

BAB III

LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Sistem Informasi

3.1.1.1 Pengertian Sistem

Di era globalisasi ini tentu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tidak lepas dari suatu sistem. Kata sistem yang sering dibicarakan banyak kalangan masyarakat mempunyai definisi tersendiri. Maka dari itu sebelum membicarakan tentang sistem, ada baiknya kita harus mengetahui apa sebenarnya definisi kata sistem tersebut. Secara terpisah, pengertian sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang terdiri dari komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem dan sasaran sistem. Adapun Pengertian lainnya dapat dilihat dari pernyataan Jogiyanto (2005, h.01) bahwa :

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Mulyadi (2008,h.5) Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan suatu kegiatan pokok.

Adapun pengertian lainnya dapat dilihat dari pernyataan Oetomo dkk (2005, h.50) bahwa :

Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat dua pendekatan sistem. Kelompok pertama sistem terdiri dari jaringan prosedur sedangkan pada kelompok kedua lebih menekankan pada elemen - elemen sistem yang merupakan sub sistem dari elemen tersebut. Dari kesimpulan tersebut dapat dijelaskan bahwa pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan operasi di dalam sistem. Sedangkan pendekatan sistem yang merupakan kumpulan dari komponen atau elemen-elemen merupakan definisi yang luas dibandingkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur.

3.1.1.2 Pengertian Informasi

Secara umum Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi dapat meningkatkan pengetahuan. Berdasarkan informasi para pengelola dapat mengetahui kondisi suatu perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Informasi tersebut merupakan hasil pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan metode ataupun cara-cara tertentu. Suatu informasi dapat dikatakan baik apabila memenuhi:

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan dan harus sesuai faktanya.
2. Tepat pada waktunya, artinya informasi yang diterima tidak boleh terlambat atau ketinggalan jaman.
3. Relevan, Informasi yang didapat bermanfaat bagi pemakainnya.
4. Kolektif, adalah informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya.
5. Penegas, adalah informasi yang dapat mempertegas informasi yang telah ada

3.1.1.3 Pengertian Sistem Informasi

Secara Umum Sistem Informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen pengambilan keputusan / kebijakan dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. atau sistem informasi diartikan sebagai kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Sedangkan dalam arti luas, sistem informasi diartikan sebagai sistem informasi yang sering digunakan menurut kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data dan teknologi. Sedangkan pengertian Sistem Informasi (SI) Menurut Para Ahli adalah

- a. John F. Nash: Pengertian sistem informasi menurut John F. Nash adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.
- b. Robert A. Leitch: Menurut Robert A. Leitch, pengertian sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
- c. Henry Lucas: Pengertian sistem informasi menurut Henry Lucas adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, apabila dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam.

- d. Alter: Pengertian sistem informasi menurut Alter bahwa sistem informasi adalah sebagai tipe khusus dari sistem kerja dimana manusia dan/mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan/jasa bagi pelanggan.

3.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

3.1.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem informasi fungsional yang mendasari sistem informasi fungsional yang lainnya seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem-sistem informasi lain membutuhkan data keuangan dari sistem informasi akuntansi.

Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan disarankan untuk membangun sistem informasi akuntansi terlebih dahulu. Fungsi penting yang dibentuk Sistem Informasi Akuntansi pada sebuah organisasi antara lain :

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
- b. Memproses data menjadi into informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

Sedangkan pengertian Sistem Informasi Akuntansi atau disebut dengan SIA Menurut Ahli adalah

- a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Mulyadi (2001, h.3) mendefinisikan :

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

- b. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Baridwan (2001, h.6), :

Sistem akuntansi terdiri dari formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai suatu mengenai usaha suatu kesalahan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usaha-usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.

3.1.2.2 Peranan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi dalam sebuah organisasi memiliki peran penting. Berikut peranan ini peranan sistem Informasi Akuntansi dalam sebuah organisasi atau perusahaan :

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai akyifitas dan transaksi.
- b. Mengolah data menjadi informasi yang bisa dipakai dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Melakukan pengawasan atau control secara tepat terhadap aset organisasi atau perusahaan.
- d. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
- e. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun striktur informasinya.
- f. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap

mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.

- g. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

3.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Mulyadi, (2001, h500) mengartikan bahwa

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dan penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan”.

Selain itu sistem akuntansi penerimaan kas menurut (Gito Sudarmo) dapat diartikan juga sebagai “proses aliran kas yang terjadi di perusahaan yang bersangkutan yang terdiri dari aliran kas masuk (*cash inflow*).”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas yang dimaksud sistem akuntansi penerimaan kas yaitu suatu jaringan prosedur yang menangani suatu peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penambahan uang dalam kas yang berasal dari penjualan tunai maupun piutang yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain.

3.1.4 Pengertian Sistem Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik menurut Mardiasmo (2004:2) adalah

suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Deddi Nordiawan (2007:4) bahwa

Akuntansi Sektor publik / Pemerintahan merupakan akuntansi yang mengkhususkan pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang

terjadi di badan pemerintah yang memberikan informasi keuangan dari entitas-entitas yang tidak mencari laba (nirlaba) yang meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.

Tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab untuk mengelola data secara tepat dan efektif sesuai program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

3.1.5 Analisis Sistem

3.1.5.1 Pengertian Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. (jogiyanto, HM, 2006).

Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap (mulyadi 2008, h41) :

a. Analisis pendahuluan

Pekerjaan pengembangan sistem dalam suatu perusahaan / instansi umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analisis dalam departemen tersebut.

b. Penyusunan usulan pelaksanaan sistem

Maksud dihasilkannya dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem informasi akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi.

c. Pelaksanaan sistem

Pelaksanaan analisis didtem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksana analisis sistem.

d. Penyusunan laporan hasil analisis sistem

Hasil akhir proses suatu sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut Laporan Hasil Analisis Sistem.

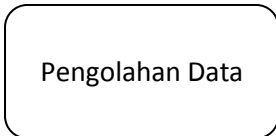
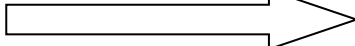



3.1.5.2 Simbol Pembuatan Bagan



Suatu sistem tentu membutuhkan alat bantu untuk menggambarkan sistem tersebut. Adapun alat bantu yang digunakan dalam membuat bagan :

a. Bagan Alir Sistem (System Flowchart)

Bagan Alir Sistem adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem (Mulyadi 2008,h57).

Tabel 3.1 Simbol Dari Bagan Alir Sistem

Proses	
Aliran	<p>Aliran Material</p>  <p>Aliran Data</p> 
Penghubung	 Halaman Sama  Halaman Lain




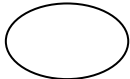
Tempat penyimpanan data atau arsip	
Sumber atau tujuan data	
Masukan / Keluaran	Diajukan oleh garis alir


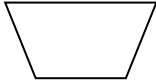

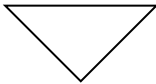
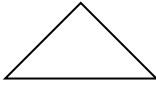

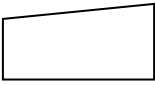
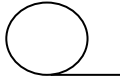
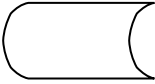
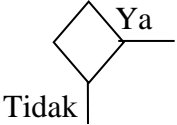
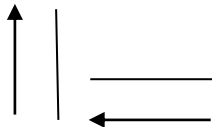
(Sumber ;Mulyadi,2008)

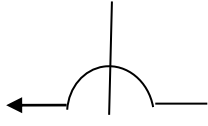
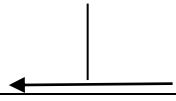
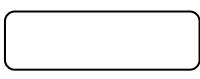
b. Bagan Alir Dokumen (Documen Flowchart)

Sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alir dokumen yang menggambarkan sistem sistem tertentu. Sebenarnya banyak cara untuk menggambarkan bagan alir dokumen suatu sistem, namun dalam buku ini dipilihkan suatu cara yang sekarang secara luas digunakan oleh para analisis sistem untuk melukiskan bagan alir dokumen suatu sistem.

Tabel 3.2 Simbol Dari Bagan Alir Dokumen

Dokumen	
Dokumen dan Tembusannya	
Catatan	
Penghubung pada halaman yang sama	

Penghubung pada halaman yang berbeda	
Kegiatan manual	
Keterangan komentar	
Arsip sementara	
Arsip permanen	
Pn=line computer proces	
Keying (typing, verifying)	
Pita menetik	
On-line storge	
Keputusan	
Garis alir	

Persimpangan garis alir	
Pertemuan garis alir	
Mulai/berakhir	
Masuk ke sistem	Dari pemasok
Keluar ke sistem lain	 Ke sistem penjualan

(Sumber ;Mulyadi,2008)

3.1.6 Desain Sistem

Dalam menyusun sebuah sistem perlu adanya desain sistem. Desain sistem adalah proses penerjemah kebutuhan informasi ke dalam alternative rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Adapun tahap desain sistem :

a. Desain sistem secara garis besar.

Berdasarkan mendapat informasi dari tahap analisis tersebut. Maka kemudian menawarkan berbagai alternatif desain secara garis besar dan menghasilkan informasi yang diperlukan pemakai.

b. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar.

c. Evaluasi sistem.

Merancang secara garis besar masing-masing blok bangunan sistem informasi.

d. Penyusunan laporan final desain sistem secara rinci.

3.2 Landasan Praktek

3.2.1 Penerimaan Kas Negara Pada KPPN Semarang I

Transaksi atas penerimaan dan pengeluaran negara melalui KPPN Semarang I ditatausahakan oleh Seksi Bendahara Umum (Bendum). Seksi Bendum melaporkan posisi penerimaan dan pengeluaran setiap harinya kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di Jakarta melalui Laporan Kas Posisi (LKP) secara *online*. Dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kas Negara, mengkompilasi LKP yang berasal dari seluruh KPPN yang ada di Indonesia. Hasil perpaduan antar KPPN tersebut merupakan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran tingkat nasional. Informasi yang dihasilkan oleh LKP ini dijadikan dasar untuk melakukan pengelolaan kas negara serta digunakan dalam pengambilan keputusan managerial terkait dengan optimalisasi keuangan negara. Keakuratan dan ketepatan LKP merupakan syarat utama untuk menghasilkan informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan managerial dalam bidang pengelolaan kas negara.

3.2.1.1 Penerimaan dan Pendapatan Negara

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara (UU No. 17 Tahun 2003). Sedangkan pendapatan negara adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005). Penerimaan negara terdiri dari :

- a. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara

yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

- b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal. PNBP juga dipengaruhi oleh perubahan indikator ekonomi makro, terutama nilai tukar dan harga minyak mentah di pasar internasional. Hal ini terutama karena struktur PNBP masih didominasi oleh penerimaan sumber daya alam (SDA), khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan tingkat lifting minyak.
- c. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat didalam APBN merupakan suumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing, lembaga/badan nasional, serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali. Perkembangan penerimaan negara yang berasal dari hibah ini dalam setiap tahun anggaran bergantung pada komitmen dan kesediaan negara atau lembaga donatur dalam memberikan donasi (bantuan) kepada Pemerintah Indonesia.

Secara lebih singkatnya sumber penerimaan negara adalah sbb :

- a. Penerimaan perpajakan :
 1. Pajak Dalam Negeri : Pajak Penghasilan, Migas, NonMigas
 2. Pajak Pertambahan Nilai
 3. Pajak Bumi dan Bangunan
 4. BPHTB
 5. Cukai
 6. Pajak Lainnya
- b. Pajak Perdagangan Internasional :
 1. Bea Masuk
 2. Pajak/Pungutan Ekspor
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 1. Penerimaan SDA
 2. Bagian Laba BUMN
 3. PNBPN lainnya

3.2.1.2 Bagian yang terkait di KPPN Semarang I

- a. Bank/Pos Persepsi PBB dan BPHTB dan Bank Operasional III PBB dan BPHTB. Berdasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara, yang dimaksud dengan Bank/Pos Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan negara bukan pajak.
- b. Pelaksana Seksi Bank (Petugas FO) bertugas :
 1. Menerima laporan harian penerimaan negara dari Petugas Bank/Pos persepsi yang terdiri dari Laporan Harian Penerimaan (LHP) dan Pelimpahan Rekapitulasi Nota Kredit, DNP, ADK dan dokumen sumber (SSP/SSBC/SSPCP/SSBP/SSPB) kemudian mencatat kedalam buku pengawasan.

2. Meneliti kelengkapan LHP dan dokumen sumber lengkap dengan BPN yang mencantumkan NTPN. Untuk LHP yang setorannya belum mendapatkan NTPN harus disertakan surat keterangan yang menyebabkan NTPN tersebut belum diperoleh.
 3. Meneliti dokumen sumber.
 4. Mencocokkan data yang tertera pada Rekapitulasi Nota Kredit dengan data DNP.
 5. Meneruskan LHP dan dokumen pendukungnya ke Pelaksana Seksi Bank dan melakukan upload data ke FTP yang ditunjuk.
- c. Pelaksana Seksi Bank
1. Menerima LHP dan dokumen pendukungnya dari pelaksana seksi Bank pada FO.
 2. Melakukan Upload ADK pada Aplikasi SPAN yang diunduh dari FTP dan apabila data ADK tidak cocok dengan data rekapitulasi Nota Kredit penerimaan negara dan pelimpahan maka ADK tidak diterima oleh aplikasi SPAN dan dikembalikan ke Bank/Pos persepsi untuk dilakukan perbaikan. Apabila sesuai lanjut ke proses validasi/pengecekan.
 3. Melakukan penelitian dengan cara mencocokkan jumlah baris transaksi dengan total nilai di LHP dengan data yang diupload.
- d. Kepala Seksi Bank
1. Melakukan proses otorisasi pada aplikasi span.
 2. Menandatangani laporan terkait penerimaan negara

3.2.1.3 Dokumen yang digunakan di KPPN Semarang I

Adapun dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan negara antara lain:

- a. Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB) merupakan surat setoran yang digunakan untuk pembayaran PBB dari tempat pembayaran ke Bank/Pos Persepsi PBB atau Bank Operasional I.
- b. Laporan Harian Penerimaan (LHP)
- c. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) merupakan surat setoran untuk pembayaran BPHTB
- d. Nota Kredit yang digunakan untuk proses pelimpahan penerimaan negara ke Bank Operasional III PBB dan BPHTB.
- e. Nota Debet, digunakan dalam proses pembagian ke Kas Negara, Kas Daerah Provinsi dan Kas Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Arsip Data Komputer (ADK) Penerimaan Negara yang berasal dari Bank/Pos Persepsi.
- g. Rekening Koran/Saldo Bilyet/Berita Saldo
- h. Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) dan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM dengan teraan NTPN dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP).
- i. Daftar Nominatif Penerimaan.
- j. Buku Bank.
- k. Daftar Perbedaan Saldo Akhir Bulan.
- l. Buku Pengawasan Harian Penerimaan dan Pembagian Bank Operasional PBB dan BPHTB.

3.2.2 Perbandingan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Negara Pada KPPN Semarang I

3.2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi penerimaan negara pada KPPN Semarang I

Dalam era globalisasi ini dan dengan berkembangnya suatu teknologi maka banyak perubahan yang terjadi. Seperti halnya pada Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Negara di KPPN Semarang 1 yang dulunya menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 1 (MPN G1) sekarang menjadi Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). MPN G2 adalah sebuah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Sistem MPN G2 ini disusun untuk memperbaiki sistem MPN sebelumnya (MPN G1).

Sebagai sebuah sistem, Modul Penerimaan Negara berhasil mengintegrasikan sistem penerimaan negara yang selama ini terpisah. Penyempurnaan Modul Penerimaan Negara melibatkan unit-unit pemilik tagihan lingkup Kementerian Keuangan yang dikenal dengan sebutan biller, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, sistem yang menghubungkan dengan sistem perbankan dan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pengelolaan infrastruktur oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal. Arah penyempurnaan MPN G2 meliputi perubahan dari sistem manual ke *billing system*, dari layanan *over the counter (teller)* ke layanan *online*, dari *single currency* menjadi dapat melayani valuta asing, dari terbatas pada beberapa jenis penerimaan menjadi mencakup keseluruhan penerimaan. MPN G2 diharapkan mendukung pelaksanaan *cash management* yang baik dengan menyajikan informasi penerimaan negara secara *real time* yang didukung keandalan teknologi informasi dalam penerapan *Treasury Single Account*.

Tabel 3.3 Perbandingan MPN G1 dan MPN G2

MPN G1		MPN G2
<i>Manual Billing System</i>	⇒	<i>Electronic Billing System</i>
<i>Layanan Over The Counter</i>	⇒	<i>Layanan Online & Flexible</i>
<i>Tidak Melayani Seluruh Transaksi Penerimaan Negara</i>	⇒	Melayani Seluruh Transaksi Penerimaan Negara
<i>Layanan Single Currency (Rupiah)</i>	⇒	<i>Layanan Multiple Currencies</i> (termasuk valas)
<i>Disclaimer</i>	⇒	WTP
<i>Pengelolaan Layanan & Data Transaksi Per Unit Eselon I</i>	⇒	Pengelolaan Layanan & Data Transaksi Bersama & Terkoordinasi

(Sumber: www.kppnsmg1.net)

Pengertian Billing System

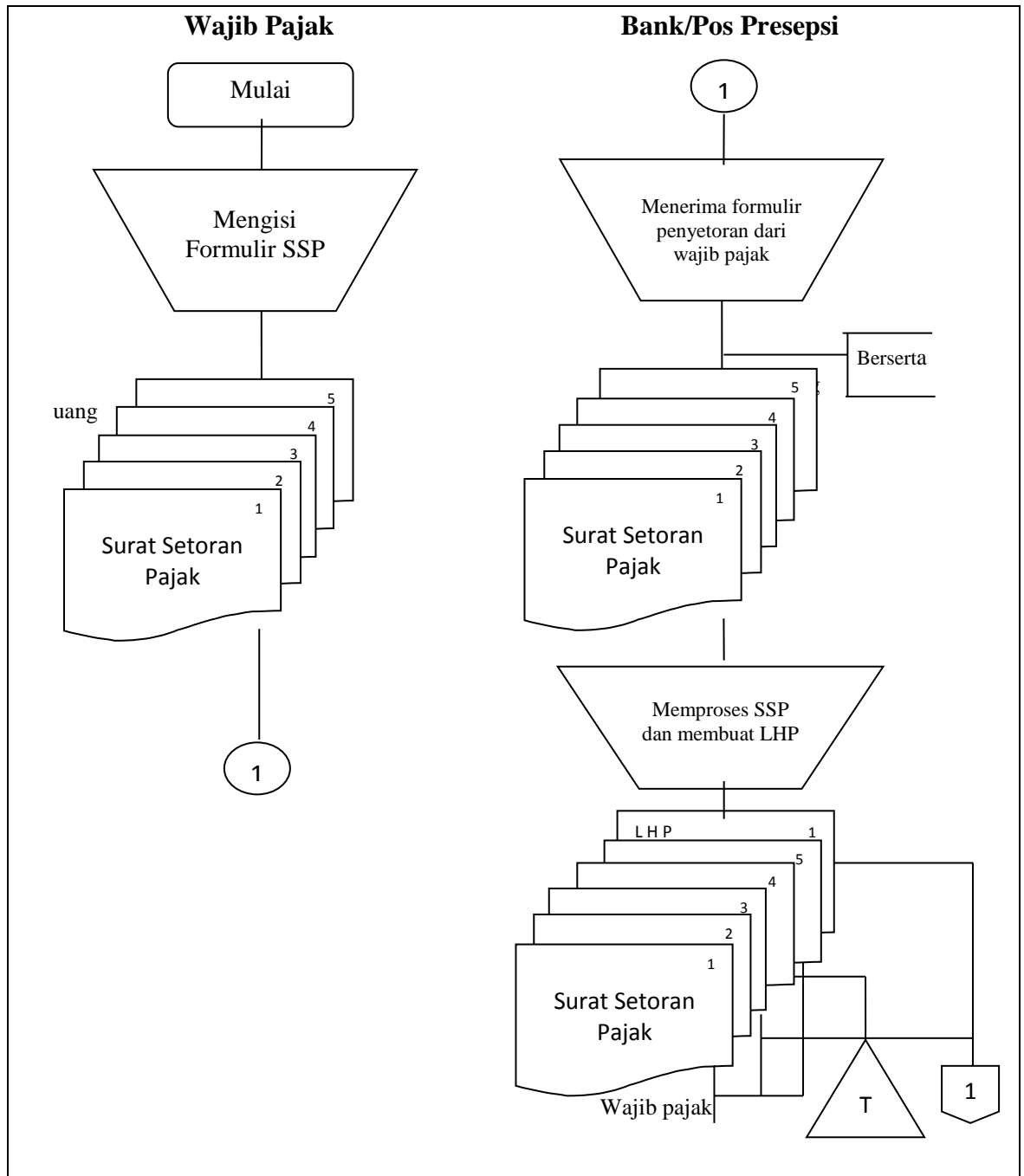
Billing system adalah sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual.

Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor. Kode billing terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama adalah kode penerbit *billing*.

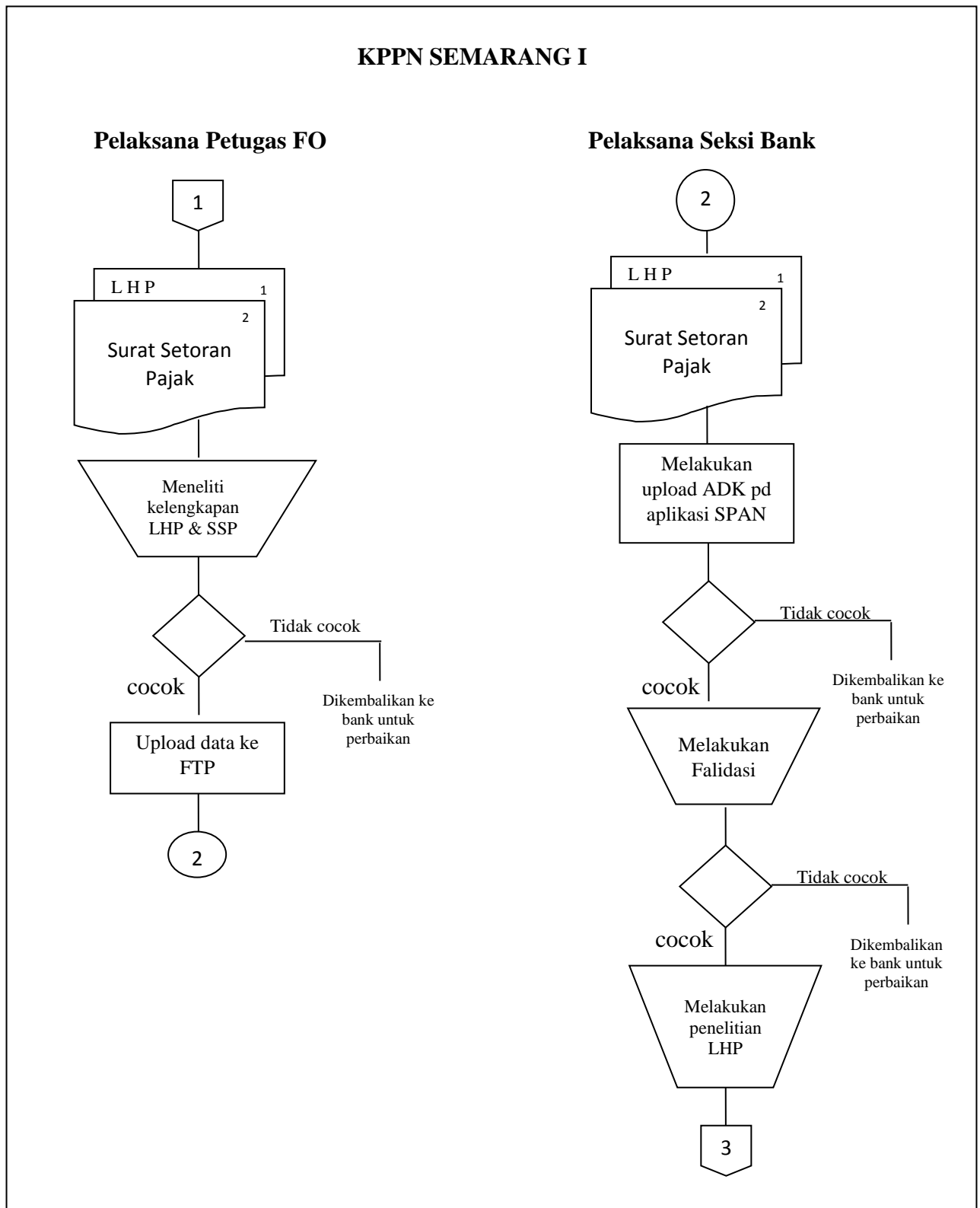
3.2.2.2 Bagan Alir Prosedur

Bagan Penerimaan Negara menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 1 (MPN G1).

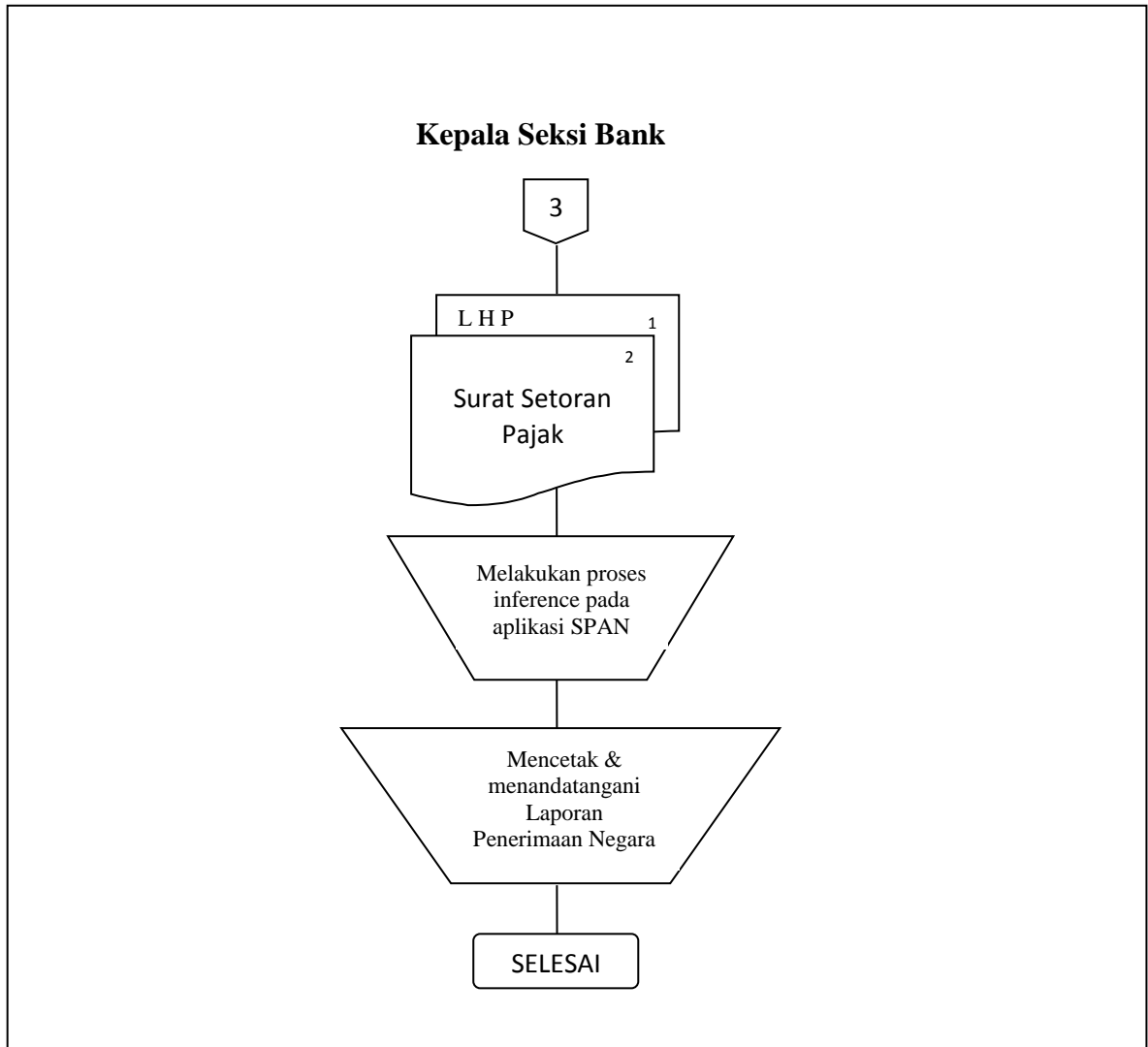
Gambar 3.1 Proses Penerimaan Negara MPN G1 (Lanjutan)



Gambar 3.1 Proses Penerimaan Negara MPN G1 (Lanjutan)



Gambar 3.1 Proses Penerimaan Negara MPN G1



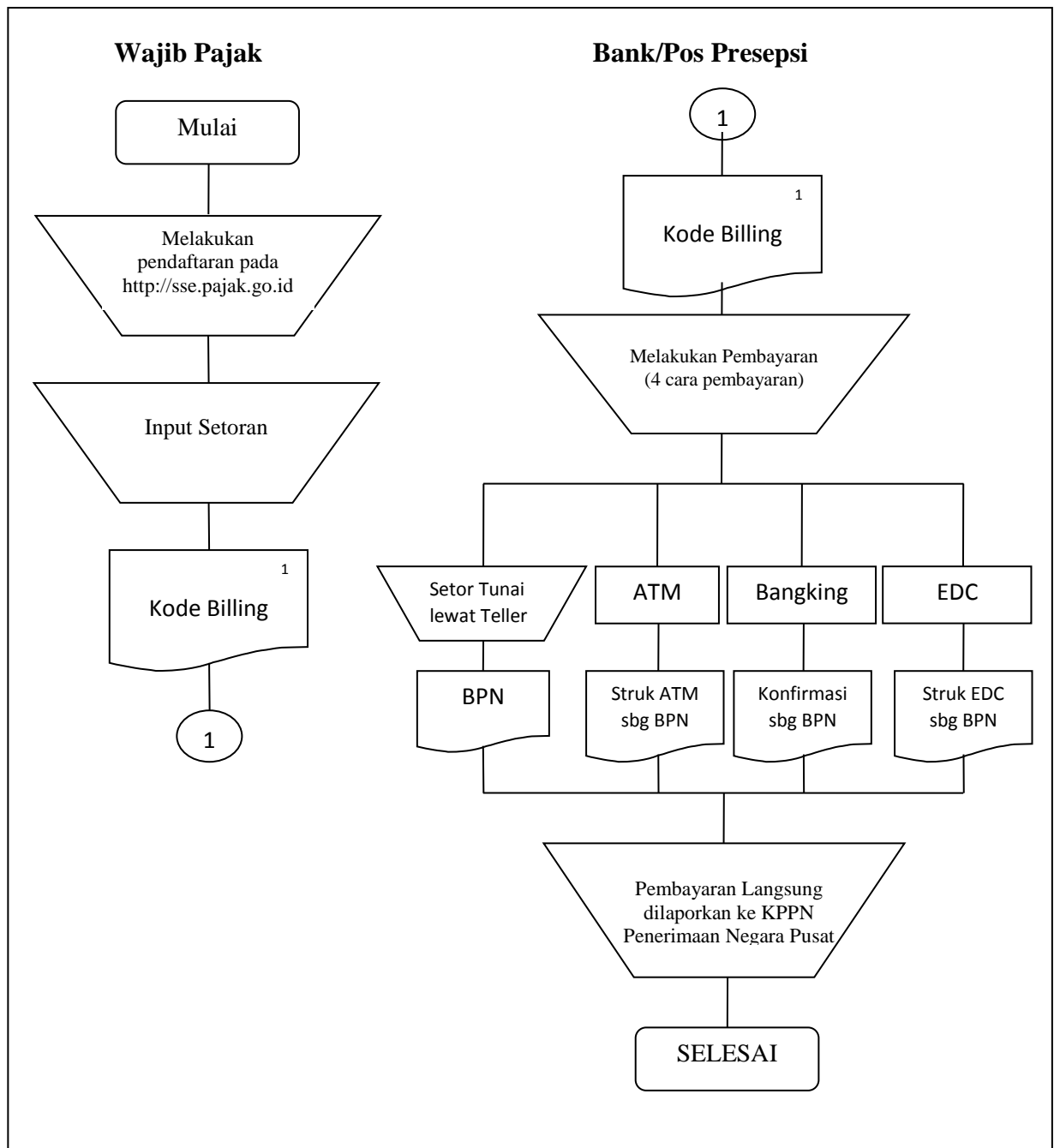
Deskripsi :

1. Wajib pajak mengisi formulir SSP. SSP terdiri dari 5 rangkap.
2. Bank menerima SSP 5 rangkap dari wajib pajak bersamaan dengan uang setoran.
3. Bank memproses setoran SSP dan membuat LHP.
4. Setelah diproses SSP lembar 1,3,5 dikembalikan kepada wajib pajak, SSP lembar 2 dikirimkan ke KPPN Semarang I, SSP lembar 4 diarsipkan permanen sesuai tanggal.

5. Pada KPPN Semarang I tepatnya di bagian FO menerima LHP dan SSP lembar 2.
6. Meneliti kelengkapan LHP dan SSP apabila tidak cocok dikembalikan ke Bank untuk diperbaiki dan apabila cocok bagian FO mengupload data ke FTP lalu dikirimkan ke bagian pelaksana Seksi Bank.
7. Pelaksana Seksi Bank menerima LHP dan SSP lembar 2.
8. Melakukan upload ADK pada aplikasi SPAN. Apabila tidak cocok dikembalikan ke bank untuk diperbaiki dan apabila cocok melakukan validasi.
9. Melakukan validasi pada SPAN apabila data tidak valid dikembalikan ke bank dan jika data valid meneruskan penelitian LHP dan dokumen pendukung. Dan menyerahkan ke kepala seksi bank untuk disetujui.
10. Kepala seksi bank menerima LHP dan SSP lembar 2.
11. Melakukan proses inference pada aplikasi SPAN.
12. Mencetak dan menandatangani Laporan Penerimaan Negara

Bagan Penerimaan Negara menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 1 (MPN G1).

Gambar 3.2 Proses Penerimaan Negara MPN G2



Deskripsi :

1. Wajib pajak melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet di sse.pajak.go.id.
2. Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan nomor register pembayaran atau ID-Billing. Masa berlaku ID-Billing sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
3. Melakukan pembayaran (terdapat 4 cara pembayaran) :
 - ✓ Teller menghasilkan dokumen BPN.
 - ✓ ATM menghasilkan dokumen berupa struk ATM sebagai BPN.
 - ✓ Banking menghasilkan dokumen berupa konfirmasi sebagai BPN.
 - ✓ EDC (*Electronic Data Capture*) menghasilkan struk EDC sebagai BPN.
4. Pembayaran Langsung dilaporkan ke KPPN Penerimaan Negara Pusat.

3.2.3 Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam Proses Penerimaan Kas Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I.

Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I, salah satu tugasnya adalah melakukan proses penerimaan negara. Dalam proses penerimaan negara menggunakan proses MPN G1 tentunya banyak hambatan-hambatan yang terjadinya selama proses tersebut. Hambatan-hambatan yang terjadinya dalam proses pencairan dana tentunya sangat mengganggu. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi :

- a. Terkadang terjadi kesalahan sistem.
- b. Banyaknya proses yang harus dilewati sehingga jika terjadi banyak wajib pajak yang setor uang pajak tentunya banyak memakan waktu.

Hambatan hammbatan yang ada tersebut tentunya tentunya kurangnya kesadaran wajib pajak dan kesalahn sistem yang terjadi pada KPPN Semarang I. Sehingga proses penerimaan negara yang harusnya dapat selesai 1 hari dapat selesai lebih dari 1 hari. Oleh karena itu maka di buatlah sistem penerimaan negara MPN G2. Dimana pada sistem tersebut wajib pajak dapat melakukan proses pembayaran melalui onlain dan dapat dilakukan dimana saja. Tentunya perlu diadakan sosialisai mengenai sistem MPN G2. Sehingga para wajib pajak bisa melakukan proses MPN G2 tanpa hambatan.